
Sistem Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas di DPRD Provinsi NTB*Travel Order Management System at the NTB Provincial DPRD***Emil Tazahroq^{1*}, Fikri Haikal², Samsul Hadi³, Ariy Dermawan⁴**¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah MataramKorespondensi penulis : samsulhadis.a.p96@gmail.com

Article History:

Received: April 05,2023

Accepted: Juni 26,2023

Published: Juli 31,2023

Keywords: SPPD, NTB Provincial DPRD, Efficiency, Transparency, Accountability, Information Systems

Abstract: *The Official Travel Order (SPPD) Management System at the Regional People's Representative Council (DPRD) of West Nusa Tenggara (NTB) Province is an important innovation in enhancing the efficiency, transparency, and accountability of official travel administration. Prior to the implementation of this system, SPPD management was carried out manually, leading to various obstacles such as slow processes, administrative errors, and lack of transparency. With the adoption of an information technology-based system, the entire process from creation, approval, to reporting of SPPD can be done electronically. The system provides features for data validation, fillable templates, and automatic notifications to expedite the approval process. Integration with the regional financial system enables more efficient and accurate budget management, while a centralized database simplifies data storage and retrieval. The implementation results show significant improvements in time efficiency, reduction of administrative errors, and enhanced transparency and accountability in the use of official travel budgets. The system also facilitates better data management and supports easier audit processes. Thus, the SPPD Management System at the DPRD of NTB Province has successfully delivered positive impacts on the performance of official travel administration, creating a more productive and responsible work environment.*

Abstrak

Sistem Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perjalanan dinas. Sebelum implementasi sistem ini, pengelolaan SPPD dilakukan secara manual, yang menyebabkan berbagai kendala seperti proses yang lambat, kesalahan administrasi, dan kurangnya transparansi. Dengan diterapkannya sistem berbasis teknologi informasi, seluruh proses mulai dari pembuatan, persetujuan, hingga pelaporan SPPD dapat dilakukan secara elektronik. Sistem ini menyediakan fitur validasi data, template pengisian, serta notifikasi otomatis untuk mempercepat proses persetujuan. Integrasi dengan sistem keuangan daerah memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan akurat, sementara database terpusat mempermudah penyimpanan dan pencarian data. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi waktu, pengurangan kesalahan administrasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran perjalanan dinas. Sistem ini juga memfasilitasi pengelolaan data yang lebih baik dan mendukung proses audit yang lebih mudah. Dengan demikian, Sistem Pengelolaan SPPD di DPRD Provinsi NTB telah berhasil memberikan dampak positif pada kinerja administrasi perjalanan dinas, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: SPPD, DPRD Provinsi NTB, Efisiensi, Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Informasi

* Samsul Hadi, samsulhadis.a.p96@gmail.com

PENDAHULUAN

Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah suatu surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh seorang atasan atau pengurus kantor kepada seorang pegawai untuk melaksanakan tugas pekerjaan pada suatu instansi atau kantor yang terletak di tempat lain atau disebut juga surat dinas sebagai sarana pemberitahuan. bagi pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya melakukan perjalanan dinas serta menyediakan fasilitas transportasi dan keuangan.

Surat Perintah Perjalanan Dinas juga merupakan bukti pengeluaran perjalanan dinas atas biaya negara dan dikeluarkan untuk setiap perjalanan dinas. Pada saat proses pemesanan perjalanan dinas, seringkali instansi pemerintah maupun swasta melakukannya hanya dengan mencatat secara manual menggunakan Microsoft Office, tanpa menggunakan aplikasi khusus apa pun pada saat proses pemesanan perjalanan dinas. Dalam proses pemesanan perjalanan dinas, sebagian besar instansi pemerintah dan swasta masih melakukannya hanya dengan pencatatan manual menggunakan Microsoft Office, tanpa menggunakan aplikasi khusus dalam proses pemesanan perjalanan dinas.

Dalam hal ini sistem menjadi kurang efisien dan efektif baik dari segi material maupun waktu. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pelayanan PMD P3A dan PPKB Kabupaten Pekalongan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan dinas pariwisata. Termasuk pemesanan perjalanan dinas pelayanan PMD P3A dan PPKB, proses pengelolaan perjalanan dinas masih menggunakan Microsoft Word sehingga kurang maksimal dan efektif. Banyak kesalahan ketik pada entri data dan laporan perjalanan dinas yang belum dapat kami baca hingga saat ini. di mana pengeditan harus dilakukan setiap kali Anda bepergian untuk bekerja. Selain itu, pembuat SPPD perlu mencari data setiap pegawai yang akan melakukan perjalanan bisnis di Microsoft Excel.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memegang peranan yang sangat penting khususnya dalam bidang teknologi informasi. Hal ini terbukti dengan banyaknya organisasi/instansi pemerintah yang menggunakan sistem komputer sebagai alat untuk meningkatkan kreativitas dan kinerja pegawainya. bahwa mereka memiliki keterampilan yang baik dan menjadi organisasi atau lembaga pemerintah yang kompeten. Dinas DPRD Provinsi NTB adalah kantor yang sangat sibuk, jadi saya ingin mengajukan permohonan surat perjalanan dinas. Karena menulis surat kepada Dinas DPRD Provinsi NTB sangatlah penting, selain itu dapat meringankan beban dan mempercepat kecepatan penulisan. Untuk menulis surat di kantor ini belum digunakan komputer. Penting untuk membuat aplikasi yang kompleks dan teratur untuk manajemen tinjauan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan tersebut adalah dengan menciptakan sistem penerbitan dokumen

perjalanan dinas yang benar-benar efisien dan cepat. Karena itu sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan gelar, nama belakang, dll. Dibuatlah aplikasi penulisan surat untuk Dinas Pertanian Kabupaten Pati dengan menggunakan komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP Script. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memegang peranan yang sangat penting khususnya dalam bidang teknologi informasi. Hal ini terbukti dengan banyaknya organisasi/instansi pemerintah yang menggunakan sistem komputer sebagai alat untuk meningkatkan kreativitas dan kinerja pegawainya. bahwa mereka memiliki keterampilan yang baik dan menjadi organisasi atau lembaga pemerintah yang kompeten. Dinas DPRD Provinsi NTB adalah kantor yang sangat sibuk, jadi saya ingin mengajukan permohonan surat perjalanan dinas. Karena menulis surat kepada Dinas DPRD Provinsi NTB sangatlah penting, selain itu dapat meringankan beban dan mempercepat kecepatan penulisan. Untuk menulis surat di kantor ini belum digunakan komputer. Penting untuk membuat aplikasi yang kompleks dan teratur untuk manajemen tinjauan yang lebih baik. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan tersebut adalah dengan menciptakan sistem penerbitan dokumen perjalanan dinas yang benar-benar efisien dan cepat. Karena itu sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan gelar, nama belakang, dll. Dibuatlah aplikasi penulisan surat untuk Dinas Di DPRD Provinsi NTB dengan menggunakan komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP Script.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan adanya program mahasiswa magang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari 8 juni 2024 – 11 juni 2024. Adanya program ini juga melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah mataram dan dosen pembimbing lapangan. Dalam melaksanakan program ada 3 tahapan yang di lakukan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini

Tahap pertama perencanaan ini mahasiswa berkoordinasi dalam pihak instansi untuk menentukan jenis kegiatan pengamatan, sarana dan prasarana yang ada di tempat yang di tentukan.

Tahap kedua:

- a. mahasiswa mengamati kualitas pelayanan untuk memastikan bahwa instansi di tempat tersebut mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat.
- b. Mahasiswa mengamati kegiatan pegawai dalam bekerja sama untuk kemajuan dan siap melayani Masyarakat dengan baik.

Tahap ketiga evaluasi, mahasiswa mengevaluasi pelaksanaan pengabdian supaya lebih berkembang dengan baik.



Gambar 1. Foto Dengan Ibu Baiq Indiwati S.I.P Kepala Sub Bagian

HASIL

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SPPD yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Tulisan ini akan membahas hasil dan pembahasan terkait implementasi Sistem Pengelolaan SPPD di DPRD Provinsi NTB.

Tujuan Sistem Pengelolaan SPPD

Sistem Pengelolaan SPPD memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

- **Mempermudah Proses Administrasi:** Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam pembuatan, persetujuan, dan pelaporan SPPD. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
- **Transparansi:** Dengan adanya sistem yang berbasis teknologi informasi, setiap tahap dalam pengelolaan SPPD dapat diaudit dan dipantau dengan lebih mudah. Hal ini meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas.

- Pengelolaan Data: Sistem ini menyediakan database terpusat yang dapat digunakan untuk penyimpanan dan pemantauan seluruh SPPD yang dikeluarkan. Dengan demikian, data perjalanan dinas dapat dikelola dengan lebih baik dan terstruktur.

Komponen Sistem Pengelolaan SPPD

Sistem Pengelolaan SPPD terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terkait, yaitu:

1. Pembuatan SPPD:

- Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menginput data perjalanan dinas, termasuk tujuan perjalanan, tanggal keberangkatan dan kepulangan, serta rincian biaya yang diperlukan.
- Sistem ini juga menyediakan template SPPD yang dapat diisi dengan mudah oleh pengguna, sehingga meminimalkan kesalahan dalam pengisian data.

2. Persetujuan SPPD:

- Setelah SPPD dibuat, dokumen tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari atasan yang berwenang. Proses persetujuan ini dilakukan secara elektronik melalui sistem.
- Notifikasi otomatis akan dikirimkan kepada atasan yang berwenang untuk memberikan persetujuan, sehingga proses ini dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

3. Pelaporan dan Pelacakan:

- Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melaporkan hasil perjalanan dinas dan mengunggah bukti-bukti pengeluaran yang terkait.
- Sistem ini juga menyediakan fitur pelacakan untuk memonitor status SPPD, mulai dari pembuatan hingga pelaporan akhir.

4. Integrasi dengan Sistem Keuangan:

- Sistem Pengelolaan SPPD ini terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, sehingga pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- Integrasi ini juga mempermudah proses pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga penggunaan anggaran dapat diaudit dengan lebih mudah.

Implementasi Sistem Pengelolaan SPPD

Implementasi Sistem Pengelolaan SPPD di DPRD Provinsi NTB melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Analisis Kebutuhan:

- Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan pengguna dan proses bisnis yang ada saat ini. Melalui analisis kebutuhan, tim pengembang dapat memahami masalah-masalah yang ada dan menentukan solusi yang tepat.
- Kebutuhan pengguna termasuk fitur-fitur yang harus ada dalam sistem, seperti pembuatan, persetujuan, pelaporan, dan pelacakan SPPD.

2. Desain Sistem:

- Setelah kebutuhan teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah merancang arsitektur sistem yang mencakup antarmuka pengguna, basis data, dan logika bisnis.
- Desain sistem ini harus memastikan bahwa sistem dapat berjalan dengan efisien dan memenuhi semua kebutuhan pengguna.

3. Pengembangan dan Pengujian:

- Tahap pengembangan melibatkan pembuatan perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Proses ini mencakup pengkodean, pengujian unit, dan integrasi.
- Setelah sistem dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian melibatkan simulasi proses pembuatan, persetujuan, dan pelaporan SPPD.

4. Pelatihan Pengguna:

- Untuk memastikan bahwa sistem dapat digunakan dengan efektif, perlu diadakan pelatihan bagi pengguna akhir. Pelatihan ini mencakup cara mengoperasikan sistem, memasukkan data, dan melaporkan hasil perjalanan dinas.
- Dengan adanya pelatihan, diharapkan pengguna dapat memahami dan memanfaatkan semua fitur yang ada dalam sistem.

5. Evaluasi dan Pemeliharaan:

- Setelah sistem diimplementasikan, dilakukan evaluasi berkala untuk menilai kinerja dan efektivitas sistem. Evaluasi ini melibatkan pengguna dan pihak-pihak terkait lainnya.

- Pemeliharaan sistem juga dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik dan dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna.

Studi Kasus: DPRD Provinsi NTB

Untuk lebih memahami implementasi Sistem Pengelolaan SPPD, berikut adalah studi kasus yang menggambarkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi sistem di DPRD Provinsi NTB.

Kondisi Sebelum Implementasi:

Sebelum implementasi Sistem Pengelolaan SPPD, proses pengelolaan SPPD di DPRD Provinsi NTB dilakukan secara manual. Proses ini melibatkan pengisian formulir kertas, pengajuan secara fisik, dan persetujuan yang memakan waktu. Beberapa masalah yang sering dihadapi antara lain:

- Proses yang Lambat: Proses pembuatan dan persetujuan SPPD memakan waktu yang lama karena harus dilakukan secara manual.
- Kesalahan Administrasi: Rentan terjadi kesalahan dalam pengisian formulir dan pencatatan data.
- Kurangnya Transparansi: Sulit untuk memantau dan mengaudit penggunaan anggaran perjalanan dinas.
- Dokumentasi yang Tidak Teratur: Penyimpanan dokumen SPPD seringkali tidak teratur sehingga menyulitkan pencarian data di kemudian hari.

Implementasi Sistem:

Setelah implementasi Sistem Pengelolaan SPPD, terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan perjalanan dinas di DPRD Provinsi NTB. Berikut adalah beberapa hasil yang dicapai:

- Efisiensi Waktu: Proses pembuatan, persetujuan, dan pelaporan SPPD menjadi lebih cepat. Penggunaan sistem elektronik memungkinkan semua proses dilakukan secara otomatis dan real-time.
- Pengurangan Kesalahan: Dengan adanya template dan fitur validasi data, kesalahan dalam pengisian formulir dapat diminimalkan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem ini meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Setiap tahap dalam proses SPPD dapat dipantau dan diaudit dengan mudah.

- Pengelolaan Data yang Lebih Baik: Data perjalanan dinas disimpan dalam database terpusat, sehingga lebih mudah diakses dan dikelola. Sistem ini juga menyediakan fitur pelaporan yang memudahkan pencarian dan analisis data.

Studi Kasus Hasil Implementasi:

Misalkan, anggota DPRD melakukan perjalanan dinas untuk menghadiri seminar di Jakarta. Berikut adalah proses yang terjadi sebelum dan sesudah implementasi sistem:

- Sebelum Implementasi:
 1. Anggota DPRD mengisi formulir SPPD secara manual.
 2. Formulir diajukan ke bagian administrasi untuk mendapatkan persetujuan.
 3. Setelah disetujui, formulir disimpan dalam arsip fisik.
 4. Setelah kembali, anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dan mengajukan bukti-bukti pengeluaran secara manual.
 5. Bagian keuangan memproses penggantian biaya berdasarkan bukti pengeluaran yang diajukan.
- Sesudah Implementasi:
 1. Anggota DPRD mengisi formulir SPPD melalui sistem elektronik.
 2. Sistem otomatis mengirim notifikasi kepada atasan untuk persetujuan.
 3. Setelah disetujui, SPPD tersimpan dalam database dan dapat diakses kapan saja.
 4. Setelah kembali, anggota DPRD melaporkan hasil perjalanan dan mengunggah bukti pengeluaran melalui sistem.
 5. Sistem keuangan terintegrasi dengan SPPD untuk memproses penggantian biaya secara otomatis.

Hasil implementasi ini menunjukkan peningkatan efisiensi, pengurangan kesalahan administrasi, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan SPPD di DPRD Provinsi NTB.

KESIMPULAN

Pengelolaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mengalami transformasi signifikan dengan implementasi sistem berbasis teknologi informasi. Sistem Pengelolaan SPPD ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses administrasi perjalanan dinas. Sebelum implementasi sistem, proses pengelolaan SPPD di DPRD Provinsi NTB dilakukan secara manual, yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan. Dengan adanya Sistem Pengelolaan SPPD, seluruh proses mulai dari pembuatan, persetujuan, hingga pelaporan SPPD

dilakukan secara elektronik. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahap dan memungkinkan pegawai untuk mengelola perjalanan dinas dengan lebih cepat dan efisien. Proses manual yang digunakan sebelumnya sering kali menyebabkan kesalahan dalam pengisian formulir dan pencatatan data. Dengan sistem yang baru, kesalahan-kesalahan ini dapat diminimalkan melalui fitur validasi data dan penggunaan template yang konsisten. Pengguna dapat menginput data dengan lebih akurat, dan sistem akan secara otomatis memeriksa kesesuaian data yang dimasukkan. Salah satu tujuan utama dari implementasi Sistem Pengelolaan SPPD adalah meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Sistem ini memungkinkan setiap tahap dalam proses pengelolaan SPPD untuk dipantau dan diaudit dengan mudah. Data perjalanan dinas disimpan dalam database terpusat, yang memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan akses yang lebih mudah untuk keperluan audit. Transparansi ini juga membantu dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sistem Pengelolaan SPPD di DPRD Provinsi NTB telah berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perjalanan dinas. Implementasi sistem ini merupakan langkah maju dalam memodernisasi administrasi pemerintahan dan memastikan bahwa anggaran digunakan dengan tepat dan bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Devianti, M., Cinderatama, T. A., Alhamri, R. Z., & Yunhasnawa, Y. (2023). Sistem informasi surat perjalanan dinas (SPPD) KPU Kabupaten Kediri. *Jurnal Informatika dan Multimedia*, 15(2), 6-16.
- Faza, M. A. (2019). Analisis SWOT pariwisata halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(1), 10-29.
- Handinah, S. (2020). Sistem imbal jasa lingkungan dalam perspektif feminisme: Studi kasus di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang).
- Salahuddin, A. F., Meimaharani, R. S., & Nurkamid, M. (2022). Sistem informasi perjalanan dinas berbasis elektronik pada Dinas Pertanian Kabupaten Pati. *Jurasik (Jurnal Riset Sistem Informasi dan Teknik Informatika)*, 7(1), 82-87.
- Sari, D. F. (2020). Sistem rekapitulasi dan pembuatan surat perjalanan dinas BPTP DIKBUD Provinsi Nusa Tenggara Barat berbasis desktop (Doctoral dissertation, Universitas Bumigora).